

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN BADAN
SAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

Skripsi

Oleh

ERMA RODIYA
1754211002



**PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN
JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF ILLAGEOWNED ENTERPRISES (BUMDes) IN WEST PESIR DISTRICT

By

ERMA RODIYA

Community participation in managing BUMDes can increase community awareness of the importance of managing natural resources and improve community welfare. This research aims to determine the factors related to community participation in BUMDes, and to determine the relationship between the level of community participation and the level of success of BUMDes. This research was carried out in September 2023. Located in Pesisir Barat Regency. The method used in this research was descriptive qualitative with 42 respondents using a purposive sampling method. This research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from observations and interviews using questionnaires. The results of this research show that the factors related to community participation in BUMDes are the number of family dependents (X_3), and community motivation (X_4), while age (X_1) and the level of formal community education (X_2) are not related to community participation in BUMDes (Y). Correlation results using the Spearman rank correlation statistical test that have been carried out show that the relationship between community participation in BUMDes (Y) and the success of BUMDes (Z) is that the Spearman Rank correlation coefficient value is 0.933, these results indicate that there is a very strong relationship between community participation. towards BUMDes (Y) with the success of BUMDes (Z) with a significance value of 0.001 which is smaller than alpha (0.05), then a decision can be made that H_1 is accepted, meaning that there is a relationship between community participation and the success of BUMDes. The success of BUMDes cannot be separated from the contribution of the community. The majority of people are satisfied with the existence of BUMDes both in terms of the services provided by BUMDes and their contribution in solving family economic problems.

Keywords: BUMDes, Success, Community, Participation.

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

ERMA RODIYA

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, dan untuk mengetahui hubungan tingkat partisipasi masyarakat dalam tingkat keberhasilan BUMDes. Penelitian ini dilaksanakan September 2023. Berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 42 responden dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pengamatan dan wawancara menggunakan kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes yaitu jumlah tanggungan keluarga (x_3), dan motivasi masyarakat (x_4), sedangkan usia (x_1), dan tingkat pendidikan formal masyarakat (x_2) tidak berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes (y). Hasil korelasi dengan menggunakan uji statistik korelasi rank spearman yang telah dilakukan yang didapat bahwa hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap BUMDes (y) dengan keberhasilan BUMDes (y) diperoleh nilai koefisien kolerasi Rank Spearman sebesar 0,933, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara partisipasi masyarakat terhadap BUMDes (y) dengan keberhasilan BUMDes (z) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari alpha (0,05), maka dapat diambil keputusan bahwa H_1 diterima, artinya ada hubungan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan BUMDes. Keberhasilan BUMDes tidak terlepas dari kontribusi masyarakat mayoritas masyarakat merasa puas dengan keberadaan BUMDes baik dari segi pelayanan yang diberikan BUMDes maupun kontribusinya dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian keluarga.

Kata kunci: BUMDes, Keberhasilan, Masyarakat, Partisipasi.

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

**ERMA RODIYA
1754211002**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN**

Pada

**Program Studi Penyuluhan Pertanian
Jurusan Agribisnis**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

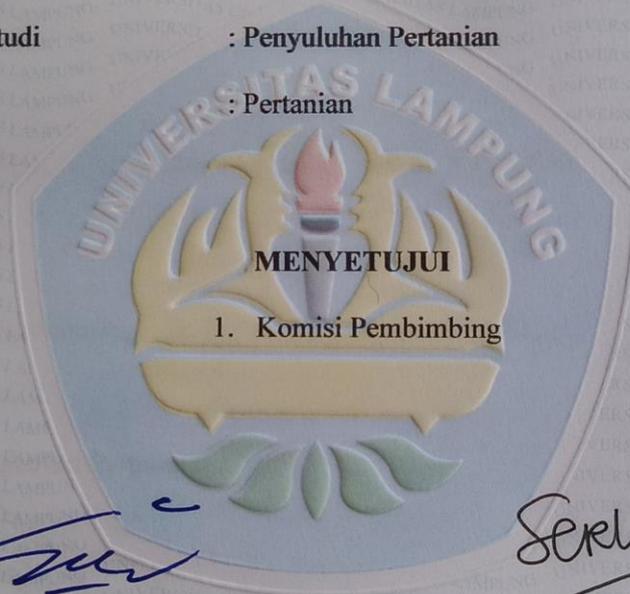
Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

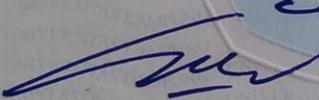
Nama Mahasiswa : **Erma Rodiya**

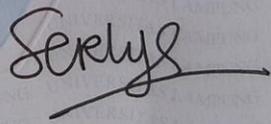
Nomor Pokok Mahasiswa : 1754211002

Program Studi : **Penyuluhan Pertanian**

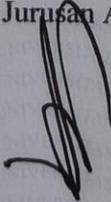
Fakultas : **Pertanian**




Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.
NIP 198101102008122001


Dr. Serly Silviyanti S., S.P., M.Si.
NIP 198007062008012023

2. **Ketua Jurusan Agribisnis**

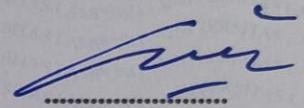

Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP 196910031994031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

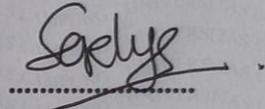
Ketua

: **Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.** .



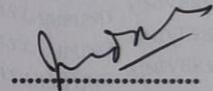
Sekretaris

: **Dr. Serly Silviyanti S., S.P., M.Si.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

NIP 196411181989021002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Juni 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erma Rodiya
NPM : 1754211002
Fakultas : Pertanian
Program Studi : Penyuluhan Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Pesisir Barat” adalah benar hasil karya ilmiah penulisan saya, bukan hasil menjiplak atau karya orang lain.

Adapun bagian tertentu dalam penelitian ini saya kutip dari karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma dan etika penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ternyata ada hal yang melanggar dari ketentuan akademik Universitas Lampung, maka saya bersedia bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024



Erma Rodiya

RIWAYAT HIDUP



Segala puji hanya milik Allah SWT, Penulis dilahirkan di Seray Sukarame, 27 juli Oktober 1998. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Erson Syah dan Ibu Masbaiti. Penulis menyelesaikan studi pendidikan Sekolah dasar di SDN 1 Sumber Agung pada tahun 2011 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2014 di SMPN 1 Ngambur, Pendidikan menengah atas di SMAN 1 Ngambur diselesaikan pada tahun 2017.

Penulis diterima pada program studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur seleksi mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri di wilayah barat Indonesia. (SMMPTN-Barat).

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis melakukan Praktik Pengenalan Pertanian (Homestay) di Desa Gunung Rejo, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018. Penulis melakukan kegiatan Praktik Umum (PU) selama 30 hari kerja efektif di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Berak Kabupaten Lampung Barat. Penulis aktif mengikuti organisasi yaitu Himasaperta (himpunan mahasiswa jurusan agribisnis).

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin, Penulis panjatkan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan teladan di setiap kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi berjudul “Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Pesisir Barat ” telah banyak pihak yang terlibat dan membantu. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si, selaku Ketua Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3. Dr. Yuniar Aviati, S.P., M.T.A., selaku Sekretaris Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung
4. Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si., selaku Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung
5. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.,, selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, ketulusan hati, kesabaran, ilmu, materi, bimbingan, nasihat, arahan, saran, ketelatenan, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Dr. Serly Silviyanti S., S.P, M.Si., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, ketulusan hati, kesabaran, ilmu, materi,

bimbingan, nasihat, arahan, saran, ketelatenan, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.

7. Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc., selaku Dosen Pembahas, yang memberikan doa, semangat, arahan, saran, masukan, dan semua kebaikan yang sifatnya membangun kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S. selaku Dosen yang pernah membimbing penulis yang telah memberikan doa, semangat, arahan, saran, masukan, dan semua kebaikan yang sifatnya membangun kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi. .
9. Seluruh dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian yang telah membekali Penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayah Erson Syah, S.Pd., dan Ibu Masbaiti, S.Pd., yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat kepada Penulis dengan tidak pernah lelah mendidik enulis untuk mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdoa.
11. Adik-adik tersayang, Ridha Safani, S.M., Tisya Marliyani dan Firzana Ananta yang telah memotivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Awan dan Makngah H. Hendra putra, S.Pd., M.Pd., dan Hj. Isnaina Dewi Nurul Janah, S.Pd., M.Pd., yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat kepada Penulis dengan tidak pernah lelah mendidik enulis untuk mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdoa
13. Sahabat-sahabat terbaik Saskia Susanti Haros, S.P., Erisa Pratiwi Harsya, S.P., Mega Wati Nangali, S.Pd., Nanda Pardani, S.P., M.Si., Suryaningtiyas, S.P., Evi Maharani, S.P., dan Nuke Anggita yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh karyawan dan staf Jurusan Agribisnis Mba Iin, Lucky, Mas Boim, dan Mas Bukhori yang telah banyak membantu selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
15. Teman-teman seperjuangan Prodi Penyuluhan Pertanian 2017 atas bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis.
16. Almamater tercinta dan seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Rabba'alaamiin*

Bandar Lampung
Penulis,

Erma Rodiya

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap” (Q.S. Al-Insyirah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan segala nikmat-Nya, saya persembahkan karya ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Terimakasih atas semua cinta kasih dan pengorbanan, serta khususnya doa yang selalu di panjatkan untukku. Kalian adalah penyemangat bagiku

Keluarga Besar Ku

Terimakasih semuanya, turut menyemangati dan mendoakanku

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
2. 1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.1.1. Partisipasi	6
2.1.2. Masyarakat	10
2.1.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	13
2.1.4. Pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes)	17
2.1.5. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	19
2.1.6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	21
2. 2 Penelitian Terdahulu	22
2. 3 Kerangka Pemikiran.....	28
2. 4 Hipotesis	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Konsep Dasar dan Definisi Operasional	32
3.2 Waktu, Lokasi, dan Responden Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4 Metode Analisis Data.....	37
IV. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat.....	38
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Way Krui	39
4.1.3. Gambaran Umum Kecamatan Pesisir Selatan	40
4.1.4. Gambaran Umum Kecamatan Pesisir Tengah.....	41

Halaman

4.2 Hasil Dan Pembahasan	42
4.2.1. Deskripsi Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat terhadap BUMDes (Variabel X)	42
4.2.2. Deskripsi Partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.....	47
4.2.3. Deskripsi Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pesisir Barat.....	50
4.3 Pengujian Hipotesis	52
4.3.1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.	52
4.3.2. Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Tingkat Keberhasilan BUMDes	55
V. PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data BUMDes di Provinsi Lampung	3
<u>2.</u> Jumlah BUMDes per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat	4
<u>3.</u> Penelitian Terdahulu	23
<u>4.</u> Definisi operasional Variabel X	33
<u>5.</u> Definisi operasional Variabel Y	34
6. Definisi operasional Variabel Z	35
7. Jumlah penduduk laki – laki dan perempuan per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022.	39
8. Sebaran responden berdasarkan kelompok umur	44
<u>9.</u> Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan	46
10. Sebaran responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga	47
11. Sebaran responden berdasarkan motivasi	Error! Bookmark not defined.
12. Deskripsi Partisipasi masyarakat terhadap BUMDes	48
13. Deskripsi Keberhasilan BUMDes	50
14. Hasil pengujian statistik antara variabel X dan variabel Y	52
15. Hasil pengujian statistik antara variabel Y dan variabel Z	55
16. Identitas responden	64
17. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi	66
18. Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan BUMDes	68
19. Keberhasilan BUMDes	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	30

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDPT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based onvillage*). Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (*standard of living*), peningkatan standar hidup memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (*natural resources*) berkaitan dengan hal tersebut maka proses pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan yakni *trade-off* antara kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa di satu pihak dengan kelestarian sumberdaya alam (lingkungan) dipihak yang lain. *Trade-offs* ini sulit dihindari karena kepentingan dan kondisi yang berbeda (Ratnadila, 2018). Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk implikasinya ialah sering terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya khususnya sumberdaya alam sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (degradasi lingkungan).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun

2014). Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian yang berbasis kerakyatan, setiap desa memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan banyak sumber daya alam yang tersedia. Pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar maka pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yakni otonomi daerah tujuannya agar daerah memanfaatkan dan mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan perekonomiannya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dengan diperlukannya pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) agar sumberdaya yang dimiliki dapat dikelola dan memberikan penghasilan bagi pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

BUMDes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan juga ada partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut. Partisipasi masyarakat yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan berdirinya BUMDes tersebut. Partisipasi masyarakat dimulai sejak pendirian BUMDes sampai dengan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Masyarakat dilibatkan dalam pendirian BUMDes dengan harapan akan terjadinya transparansi dan musyawarah guna mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan kegiatan BUMDes

di awasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD) yang dibentuk dari masyarakat desa dan aparat desa.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki BUMDes sebanyak 901 unit BUMDes yang tersebar pada 13 kabupaten, data BUMDes di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data BUMDes di Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Jumlah (Desa)	Jumlah BUMDES (Unit)
1	Lampung Tengah	301	23
2	Pesawaran	144	33
3	Lampung Timur	264	60
4	Way Kanan	221	69
5	Pringsewu	126	53
6	Pesisir Barat	116	56
7	Tulang Bawang	147	145
8	Mesuji	105	105
9	Tanggamus	299	22
10	Lampung Selatan	256	115
11	Lampung Utara	232	24
12	Tulang Bawang Barat	93	93
13	Lampung Barat	131	103
Jumlah		2.435	901

Sumber: Pusdatin Kemendes PDT, 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 901 unit yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan tersebar di 2.345 desa. BUMDes didirikan pada setiap daerah di bentuk berdasarkan potensi yang ada di masing – masing desa. Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat memiliki sebanyak 56 unit BUMDes yang tersebar di 116 desa/pekon. Data jumlah BUMDes per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah BUMDes per kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Pulau Pisang	3
2	Ngaras	5
3	Karya Penggawa	3
4	Pesisir Tengah	6
5	Ngambur	1
6	Pesisir Selatan	17
7	Pesisir Utara	12
8	Krui Selatan	5
9	Way Krui	4
Pesisir Barat		56

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kecamatan Pesisir Selatan memiliki jumlah BUMDes yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yang berjumlah 17 BUMDes, disusul dengan Kecamatan Pesisir Utara yang jumlah BUMDesnya sebanyak 12 BUMDes, serta Kecamatan-Kecamatan lainnya. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat diketahui bahwa BUMDes di Kabupaten Pesisir Barat mengalami beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masa depan BUMDes.

Keberadaan BUMDes tersebut masih belum bisa berjalan efektif dalam mengatasi masalah ekonomi didesa tersebut karena diduga partisipasi masyarakat masih kurang aktif untuk menjalankan dan mengembangkan BUMDes yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, maka perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Oleh sebab itu, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes?
2. Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes?
3. Bagaimana keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan perekonomian desa?
4. Apakah tingkat partisipasi masyarakat berhubungan dalam tingkat keberhasilan BUMDes?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.
3. Mengetahui keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan perekonomian desa?
4. Mengetahui hubungan tingkat partisipasi masyarakat dalam tingkat keberhasilan BUMDes?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat secara umum sebagai sumbangan ke ilmu terkait tentang partisipasi masyarakat terhadap badan usaha milik desa.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan dan juga pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga memberikan manfaat positif bagi badan usaha milik desa maupun pemerintah desa agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Abdul, Revida, dan Soetijono, 2020).

Partisipasi adalah keterlibatan diri /ego yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Terdapat tiga buah unsur penting dalam partisipasi menurut (Abdul, Revida, dan Soetijono, 2020). Yaitu :

- a) Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b) Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
- c) Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Menurut Slamet (1993), partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Basrowi dalam Astuti (2009), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya, sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Unsur – unsur yang ada dalam partisipasi (Ardyan, Firdausi, dan Mustoffa, 2023) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Terdapat keinginan masyarakat untuk mengikutsertakan diri.
3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor (Anisya dan Tantri, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan[adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.

Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

6. Motivasi

Partisipasi dapat dipengaruhi oleh motivasi semakin besar motivasi seseorang maka semakin besar tingkat partisipasinya karena dengan berpartisipasi ia akan mencapai tujuan.

Partisipasi dalam sebuah program pembangunan, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- 1) umur, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ainiya, (2014) menyebutkan bahwa umur berhubungan dengan partisipasi masyarakat karena umur menentukan seseorang untuk dapat mengambil keputusan dan usia tua dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga cenderung memiliki pendapat yang lebih besar.
- 2) tingkat pendidikan, juga berhubungan dengan partisipasi masyarakat karena pengetahuan luas yang dimiliki individu cenderung memberikan pendapat yang lebih banyak, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi.

- 3) jumlah tanggungan, memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat karena individu yang memiliki pendapat rendah cenderung akan ikut berpartisipasi rendah atau pikiran dan individu yang memiliki jumlah tanggungan yang tinggi cenderung memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan dirinya.
- 4) Motivasi petani, berhubungan nyata dengan partisipasi petani padi sawah dalam program BLP (Bantuan Langsung Pupuk karena semakin tinggi tingkat motivasi petani dalam program BLP maka tingkat partisipasi petani juga akan semakin meningkat (Badra, 2011)

2.1.2. Masyarakat

Pengertian masyarakat sudah banyak di deskripsikan yang ditulis oleh para pakar. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Fredian, 2014).

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah a union of families atau masyarakat merupakan bangunan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang di sebut dengan masyarakat (Khairuddin 2008), dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

a. Ciri-ciri Masyarakat

Menurut Mulyadi (2019), membuat criteria masyarakat untuk kehidupan kelompok manusia, diantaranya:

- 1) Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggota.
- 2) Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
- 3) Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada
- 4) Kesetiaan pada sistem tindakan utama secara bersama sama.
- 5) Melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas dari masyarakat diantaranya kemampuan atau masa hidup lebih lama dari individual normal serta dalam merekrut anggotanya secara reproduksi biologis kemudian melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

b. Unsur-unsur Masyarakat

Menurut Soekanto (2012), masyarakat mencakup beberapa unsur berikut ini:

- 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu social tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menemukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- 2) Bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda benda mati. Dengan berkumpulnya manusia akan maka akan timbul manusia manusia baru.sebagai akibat hidup bersama, timbullah system komunikasi dan peraturan peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam kelompok tersebut.
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- 4) Mereka merupakan suatu system hidup bersama. Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya, karena manusia tidak akan mampu hidup sendirian sebab manusia adalah mahluk sosial. Masyarakat

merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan untuk bertahan hidup.

c. Masyarakat Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan masyarakat desa yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian, peternakan, perikananatau gabungan dari kesemuanya itu dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.

Menurut Fredian (2014), ciri-ciri masyarakat desa ditandai oleh empat ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identtas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya. Menurut Mulyadi (2019), sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-kesan atau perasaanperasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat diatas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

2.1.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Departemen pendidikan nasional (2007) mengatakan BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun dengan prakarsa dan partisipasi masyarakat, BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan sehingga tidak menciptakan model usaha yang tidak disamai oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Tujuan utama dari pendirian Bumdes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa tujuan khusus yang dapat dijabarkan adalah:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.
3. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di desa.
4. Memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran

dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha.

5. Membangun dan memperkuat hubungan kerjasama antara Bumdes dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk mendukung pengembangan usaha di desa.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di desa dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Bumdes merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa.
2. Bumdes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.
3. Bumdes dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
4. Bumdes memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya yang ada di desa.
5. Bumdes dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif, seperti usaha pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan sebagainya.
6. Bumdes dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat non-produktif, seperti pelayanan umum, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
7. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Bumdes dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, akses ke pasar, dan bantuan modal.
8. Pemerintah juga memberikan insentif bagi Bumdes yang berkontribusi dalam pembangunan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa menyatakan bahwa badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 tentang badan usaha milik desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar.
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Menurut tim pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya adalah:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- e. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes

- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemdes, BPD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Pernyataan ini sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam perda maupun perdes. Indikator keberhasilan BUMDes dapat dilihat melalui meningkatnya laba/aset secara konsisten, meluasnya cangkupan konsumen, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

- a. *Bisnis Sosial/Serving*. Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan lain sebagainya.
- b. *Keuangan/Banking*. BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin.
- c. *Bisnis Penyewaan/Renting*. Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.
- d. *Lembaga Perantara/Brokerling*. BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar.
- e. *Perdagangan/Trading*. BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa

dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

- f. *Usaha Bersama/Holding*. BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.
- g. *Kontraktor/Contracting*. Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, dan lain-lain.

2.1.4. Pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes)

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menciptakan lapangan kerja di desa tersebut agar meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Abdul, Revida, Soetijono (2020) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendirisel hingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang dapat menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibuat untuk sebuah tempat perjuangan masyarakat yang kurang mampu, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*“good governance”*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan termasuk perumahan dan permukiman, maupun social (Ahmad, 2020).

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem

penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Ahmad, 2020).

Selain tahap-tahap pembentukan, syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

2.1.5. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
 - 2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - 3) Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78
- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
 - 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 79
- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa
 - 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa
 - b) Tabungan Masyarakat
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Pinjaman
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
 - d) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 80
- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81
 - 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Kepengurusan
 - c) Hak dan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang di dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan (Ridwan, 2013).

2.1.6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar, sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini digunakan dengan baik, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2. 2 Penelitian Terdahulu

Sebagai data pendukung maka sebuah dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting. Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi. Penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat terhadap badan usaha milik desa menjadi salah satu literatur acuan atau landasan dalam

penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian dan pengembangan dalam partisipasi masyarakat terhadap badan usaha milik desa dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Handayani, 2020	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2020	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan contoh partisipasi masyarakat di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar adalah dengan memberikan bantuan berupa tenaga dan pemikiran. Kendala partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan hasil pengolahan sampah.
2	Yanfika, Nurmayasari, Rangga, Silviana, 2023	Dukungan Lembaga dan Tingkat Partisipasi Petani dalam Keberlanjutan Usahatani Padi Sehat di Desa Rejo Asri	deskriptif kuantitatif dengan Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh berpengaruh terhadap partisipasi petani, sedangkan indikator kepemimpinan ketua kelompok tani dan akses terhadap informasi tidak berpengaruh dengan partisipasi petani padi sehat.

Tabel 3. Lanjutan

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
3.	Herlina, 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ngaso Mandiri Di Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017	kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Partisipasi masyarakat Desa Ngaso dalam pemanfaatan BUM Desa Ngaso Mandiri tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat desa yang memanfaatkan BUM Desa bukan hanya sebagai tempat meminjam tetapi juga sebagai tempat menabung masyarakat desa. Walaupun begitu BUM Desa Ngaso Mandiri masih memiliki sejumlah tunggakan dikarenakan para pemanfaat BUM Desa yang telat membayar angsuran dan penyelesaian masalah tunggakan dilakukan bersama-sama dengan pengawas BUM Desa Ngaso Mandiri. Faktor yang menentukan keberhasilan BUM Desa Ngaso Mandiri dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu Kepemimpinan Manajerial dan Tata Kelola (KMT), Jaringan, Skala Jangkauan Usaha, Inisiatif/Inovasi dan Upaya Kolektif.
4.	Haikal, Audrey, dan Martha, 2020	Partisipasi Masyarakat Dalam BUMDes Di Desa Bulawan Ii Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	survey	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dengan jumlah rata-rata delapan responden dengan presentase 20% yang telah berpartisipasi dan rata-rata 32 responden dengan presentase 80% yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan program BUMDes

Tabel 3. Lanjutan

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
5.	Pratiwi, 2019	Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Di Desa Jinengdalem	deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Persepsi masyarakat dikategorikan setuju hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yakni : dimensi pelaku persepsi ,objek yang dipersepsikan dan konteks dari situasi persepsi itu dilakukan jawaban responden dikategorikan Setuju, dan partisipasi masyarakat dikategorikan tinggi hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yakni dimensi perencanaan program kerjadan b) dimensi pelaksanaan program kerja jawaban responden dikategorikan Tinggi
6.	Ramadhani, Hasanuddin, dan Listiana, 2020	Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Analisis deskriptif dan uji korelasi Rank Spearman	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam perencanaan kegiatan sebagian besar tergolong sedang, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar tergolong tinggi, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan tergolong tinggi, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan tergolong sedang Secara keseluruhan sebagian besar partisipasi anggota kelompok tani dalam Program Upsus Pajale tergolong tinggi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani, yaitu motivasi, tingkat pengetahuan, dan persepsi petani.

Tabel 3. Lanjutan

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
7.	Tiballa, 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program Bumdes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus Bumdes dan masih minimnya kualitas dari pengurus.
8.	Kasila, Kolopaking, 2018	Partisipasi Pemuda Desa Dalam Perkembangan Usaha BUMDes “Tirta Mandiri” (Studi Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)	kuantitatif yang didukung data kualitatif	partisipasi pemuda dalam BUMDes paling tinggi pada tahap pelaksanaan. tingkat komunikasi adalah faktor yang memiliki hubungan terhadap tingkat partisipasi pemuda, sebab komunikasi yang baik antara pihak didalam BUMDes memudahkan pemuda untuk bekerja sama. Ketiga, tingginya partisipasi pemuda memberikan kemajuan terhadap perkembangan BUMDes “Tirta Mandiri” dari segi kelembagaan, kemampuan anggota dan perluasan pasar produk.

Tabel 3. Lanjutan

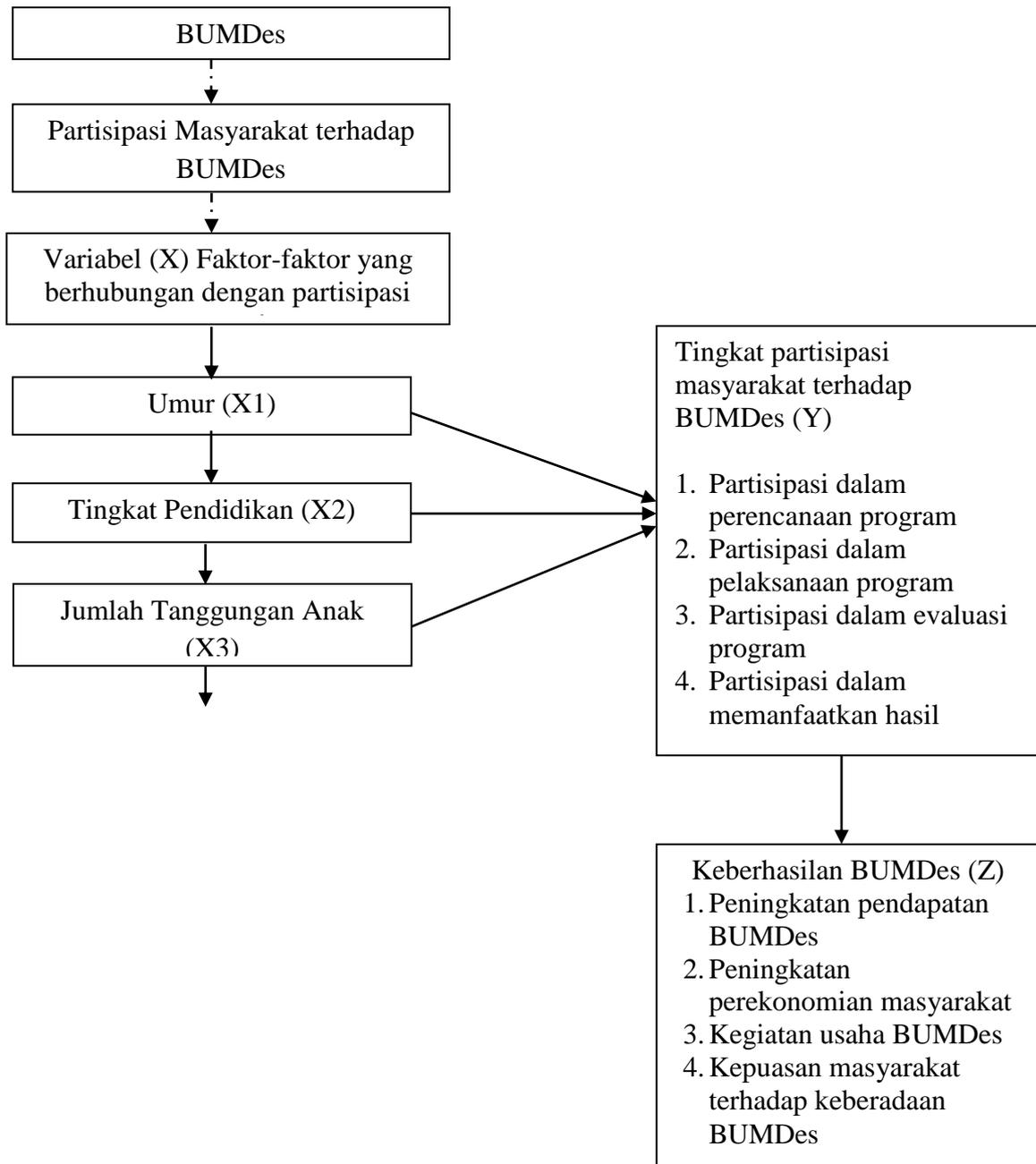
No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
9.	Rahma, Jenita, dan Hasanuddin, 2022	Partisipasi Masyarakat terhadap Program Kampung Iklim di Pekon Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan partisipasi masyarakat di Pekon Gisting Bawah sudah cukup baik dalam melaksanakan dan menerapkan ProKlim secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besarnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan setiap pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal mulai dari tahapan pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, dan pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan.
10.	Pratiwi, Sujana, Haris, 2019	Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Di Desa Jinengdalem	deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : persepsi masyarakat terhadap program kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Jinengdalem dikategorikan setuju hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yakni : dimensi pelaku persepsi ,objek yang dipersepsikan dan konteks dari situasi persepsi itu dilakukan jawaban responden dikategorikan Setuju, dan partisipasi masyarakat terhadap program kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Jinengdalem dikategorikan tinggi hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yakni dimensi perencanaan program kerjadan b) dimensi pelaksanaan program kerja jawaban responden dikategorikan Tinggi

2.3 Kerangka Pemikiran

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal. Keberadaan BUMDes sangat menunjang kebutuhan dan potensi desa, sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi, maka dari itu perlu diteliti apakah masyarakat berpartisipasi atau tidak dalam pengembangan badan usaha milik desa tersebut.

Partisipasi dalam sebuah program pembangunan, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu (X): 1) umur, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ainiya, 2014 menyebutkan bahwa umur berhubungan dengan partisipasi masyarakat karena umur menentukan seseorang untuk dapat mengambil keputusan dan usia tua dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga cenderung memiliki pendapat yang lebih besar. 2) tingkat pendidikan, juga berhubungan dengan partisipasi masyarakat karena pengetahuan luas yang dimiliki individu cenderung memberikan pendapat yang lebih banyak, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi. 3) jumlah tanggungan anak, memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat karena individu yang memiliki pendapat rendah cenderung akan ikut berpartisipasi rendah atau pikiran dan individu yang memiliki jumlah tanggungan yang tinggi cenderung memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan dirinya. 4) Motivasi masyarakat, berhubungan nyata dengan partisipasi dalam program maka tingkat partisipasi juga akan semakin meningkat (Badra, 2011). Untuk melihat tingkat partisipasi seseorang atau masyarakat mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Ndraha (1990), empat indikator partisipasi tersebut meliputi (Y): (1) partisipasi dalam perencanaan, (2) partisipasi dalam

pelaksanaan program, (3) partisipasi dalam penilaian, dan (4) partisipasi dalam pemanfaatan. Variabel-variabel tersebut dipilih karena sudah dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan dan merupakan variabel yang diduga berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes. Keberhasilan BUMDes (*Z*) yang dilihat dari adanya peningkatan laba/asset, meluasnya cakupan konsumen, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, dan meningkatnya perekonomian masyarakat (Aprillia, Cahyono dan Nastiti, 2021). Secara lebih rinci bagan alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. 4 Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada hubungan yang nyata antara umur responden dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes.
2. Diduga ada hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan responden dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes.
3. Diduga ada hubungan yang nyata antara lama sebagai anggota BUMDes dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan BUMDes.
4. Diduga ada hubungan yang nyata antara partisipasi masyarakat dengan keberhasilan BUMDes

III. METODE PENELITIAN

3.1 Konsep Dasar dan Definisi Operasional

BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.

Variabel-variabel yang diteliti dari penelitian ini meliputi umur (X_1), tingkat pendidikan (X_2), tanggungan keluarga anak (X_3), tingkat partisipasi dalam perencanaan program (Y_1), tingkat partisipasi dalam pelaksanaan program (Y_2), tingkat partisipasi dalam evaluasi program (Y_3), tingkat partisipasi dalam memanfaatkan hasil (Y_4), dan Keberhasilan BUMDes (Z).

Definisi operasional dan pengukuran variabel dari masing-masing variabel diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Definisi operasional Variabel X

Variabel X	Definisi Operasional	Pengukuran	Satuan Pengukuran	Jumlah Pertanyaan	Klasifikasi
Umur (X_1)	Rentang kehidupan yang diukur dengan satuan tahun (Thn).	Lamanya responden hidup sejak dilahirkan sampai penelitian dilakukan	Tahun	1	(15-25) = Muda (26-50) = Setengah Baya (50-64) = Tua
Tingkat Pendidikan (X_2)	Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat.	Lamanya responden dalam menempuh pendidikan formal	Tahun	1	(SD) = Rendah (SMP) = Sedang (SMA) = Tinggi
Jumlah tanggungan anak (X_3)	Banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga	Jumlah tanggungan keluarga yang ada di rumah tangga	Jiwa	1	a. Tinggi b. Sedang c. Rendah

Tabel 5. Definisi operasional Variabel Y

Variabel Y	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Satuan pengukuran	Jumlah Pertanyaan	Klasifikasi
Tingkat partisipasi dalam perencanaan program	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program dengan melihat keikutsertaan dalam rapat dan memberikan saran serta masukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BUMDes ikut serta dalam rapat pembuatan program BUM Des 2. Anggota BUM Pekon ikut memberikan saran dan masukan dalam menyusun perencanaan 	Skor	4	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang c. Rendah
Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan program	Jumlah kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut serta dalam mengikuti kegiatan BUMDes 2. Pengambilan keputusan dalam menjalankan Program BUMDes 	Skor	3	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang c. Rendah
Tingkat partisipasi dalam evaluasi program	Masyarakat melakukan evaluasi dalam kegiatan program.	Evaluasi dilaksanakan Pada setiap akhir kegiatan (Memberikan penilaian Terhadap laporan Program BUM Pekon)	Skor	2	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang c. Rendah

Tabel . Lanjutan

Variabel Y	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Satuan pengukuran	Jumlah Pertanyaan	Klasifikasi
Tingkat partisipasi dalam memanfaatkan hasil	Hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BUM Pekon mendapatkan hasil dari program BUMDes sesuai dengan tujuan 2. Keuntungan dari program BUMDes bagi desa 	Skor	5	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang c. Rendah

Tabel 6. Definisi operasional Variabel Z

Variabel Z	Definisi Operasional	Pengukuran	Satuan Pengukuran	Jumlah Pertanyaan	Klasifikasi
Keberhasilan BUMDes (Z)	Tingkat keberhasilan program dalam kegiatan BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan 2. Peningkatan kerja sama 3. Penyediaan sarana prasarana 4. Kesetaraan pelayanan masyarakat 	Skor	9	<ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang c. Rendah

3.2 Waktu, Lokasi, dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan September 2023. Penelitian ini dilaksanakan di tiga BUMDes yaitu BUMDes di kecamatan Pesisir Tengah, BUMDes di kecamatan Pesisir Selatan dan BUMDes di kecamatan Way Kruki. BUMDes tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa tiga bumdes tersebut merupakan BUMDes yang paling aktif di kabupaten Pesisir Barat, di lihat dari berjalannya kegiatan kegiatan pada BUMDes tersebut. Populasi pada penelitian ini yaitu anggota BUMDes pada tiga BUMDes yaitu BUMDes way Kruki sebanyak 12 anggota, BUMDes pesisir tengah 14 anggota, dan BUMDes Pesisir selatan 16 anggota, sehingga total populasi sebanyak 42 orang. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh populasi anggota BUMDes Way Kruki, BUMDes Pesisir Tengah dan BUMDes Pesisir Selatan dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hal tersebut jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 42 anggota BUMDes.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Data primer yaitu, data yang diambil langsung dari responden dengan instrument penelitain kuesioner yang telah dibuat sebelum memulai kegiatan wawancara. Data primer yang dikumpulkan meliputi identitas responden, partisipasi masyarakat dengan bergabung pada BUMDes
- 2) Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari beberapa instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, dan instansi lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum wilayah, asset BUMDes, Keanggotaan BUMDes dan lain sebagainya.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan ketiga adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua dan keempat adalah metode analisis *rank spearman*. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa korelasi *rank spearman* digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel berskala ordinal, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Berikut rumus *rank spearman*:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

ρ = Koefisien Korelasi Rank Spearman

b_i = Rangkaing Data Variabel $X_i - Y_i$

n = Jumlah Responden

Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi Rank Spearman, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan nilai ρ hitung dengan ρ tabel yang dirumuskan sebagai berikut.

Jika, ρ hitung ≤ 0 , berarti H_o diterima dan H_a ditolak.

Jika, ρ hitung > 0 , berarti H_o ditolak dan H_a diterima.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes secara umum dengan menggunakan 14 pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat terhadap BUMDes di Kabupaten Pesisir Barat masuk dalam klasifikasi sedang dengan persentase sebesar 50 persen sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil turun lapang dilapangan masyarakat seringkali memberikan saran mengenai program dan keberlanjutannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat terutama yang berada dalam keanggotaan BUMDes ikut berpartisipasi dalam perencanaan BUMDes. Jika dilihat dari BUMDes yang menjadi lokasi penelitian BUMDes menyesuaikan dengan potensi desa yang ada.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes yaitu jumlah tanggungan keluarga (X_3), sedangkan usia(X_1), dan tingkat pendidikan formal masyarakat (X_2) tidak berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap BUMDes (Y).
3. Keberhasilan BUMDes masuk dalam klasifikasi tinggi dengan persentase sebesar 57,14 persen. Keberhasilan BUMDes di Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari terjadinya peningkatan pendapatan BUMDes, peningkatan perekonomian masyarakat, kegiatan usaha BUMDes yang mulai berkembang dan disesuaikan dengan potensi desa dan kepuasan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes.
4. Hasil korelasi dengan menggunakan uji statistik korelasi *rank spearman* yang telah dilakukan yang didapat bahwa hubungan antara

partisipasi masyarakat terhadap BUMDes (Y) dengan keberhasilan BUMDes (Z) diperoleh nilai koefisien korelasi *Rank Spearman* sebesar 0,933, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara partisipasi masyarakat terhadap BUMDes (Y) dengan keberhasilan BUMDes (Z) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari alpha (0,05), maka dapat diambil keputusan bahwa H1 diterima, artinya ada hubungan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan BUMDes. Keberhasilan BUMDes tidak terlepas dari kontribusi masyarakat mayoritas masyarakat merasa puas dengan keberadaan BUMDes baik dari segi pelayanan yang diberikan BUMDes maupun kontribusinya dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian keluarga.

5.2. Saran

Saran yang diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah perlu memperhatikan perkembangan dan keberlanjutan BUMDes di pesisir barat terutama dalam sarana dan prasarana, perlu diadakannya keberlanjutan mengenai pelaporan dan evaluasi program BUMDes.
- 2) Bagi Pemerintah perlunya pelatihan lebih mendalam lagi kepada pengurus BUMDes agar menjadi lebih baik lagi.
- 3) Bagi Pengurus BUMDes, hendaknya memberikan dan memperluas akses kemitraan untuk para anggota BUMDes dalam hal pemasaran produk dan pemasaran produk agar dapat dipasarkan keluar daerah.
- 4) Bagi peneliti lain disarankan agar meneliti tingkat pendapatan untuk mengukur tingkat keberhasilan BUMDes

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R,S.,E, Revida,I,K, Soetijono, . 2020. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Ahmad, H, I. 2020. *SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Ainiya R. 2014. Tingkat Partisipasi dan Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Posdaya Sauyunan. *Skripsi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Annisya, N., dan Tantoro, S. 2017. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jom Fisip, Vol. 4(2)*
- Apriliani, Tantri. 2017. "*Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Program Ecovillage Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor*". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
- Aprillia, A. R., Cahyono, D., & Nastiti, A. S. (2021). Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 35-44.
- Ardyan, Firdausi, Mustoffa. 2023. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 7 (3).
- Astuti, D dan, Irene, S. 2009. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Badra, V. N. 2011. Partisipasi Petani Padi Sawah Dalam Program Bantuan Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Balai pustaka. Jakarta.
- Dewi, A. 2010, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Nuha Medika. Yogyakarta
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat. 2019. *Daftar BUM-Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat*. DPMP Pesisir Barat. Pesisir Barat.

- Firdaus, M, M. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. DOTPLUS Publisher. Riau.
- Fredian, T, N. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Haikal, M., Audrey, M., dan Martha, S. 2020. Partisipasi masyarakat dalam BUMDes di Desa Bulawan Ii Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan* 2 (1), hal 33 - 44.
- Handayani, A, D. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Herlina, S. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Ngaso Mandiri Di Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan. *Skripsi*. Universitas Riau. Riau.
- Kasila, M., dan Kolopaking, L, M. 2018. Partisipasi pemuda desa dalam perkembangan usaha BUMDes “Tirta Mandiri” (Studi Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah). *JSKPM2*(1): 43-58.
- Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Liberty. Yogyakarta Lampung Selatan. Universitas Lampung. Lampung.
Langsung Pupuk (BLP) Di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten
- Meilana, R., Yanfika, H., & Hasanuddin, T. 2023. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Dinamika dan Keberhasilan Bumdes dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Pesawaran. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 1-8.
- Mulyadi, M. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Nadi pustaka. Bogor.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan masyarakat*
- Pratiwi, E. 2019. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDes Dwi Amertha Sari Di Desa Jinengdalem. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Pratiwi. E., Sujana., dan, Haris, I, A. 2019. Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap penerapan program kerja BUMDes dwi amertha sari di Desa Jinengdalem. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Hal 11 (1).

- Pujom, M, D. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah*. Deepublish. Sleman.
- Purwanto A, B. M. 2018. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K31 Universitas Padjadjaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Purwanto, A., & Taftazani, B. M. 2018. Pengaruh jumlah tanggungan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja k31 Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 33-43.
- Rahma, A., Jenita., dan Hasanuddin, T. 2022. Partisipasi Masyarakat terhadap Program Kampung Iklim di Pekon Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus. *Seminar Nasional SnaiL III*.
- Rahmawati, F., & Runanto, D. (2019). Peran Motivasi dalam Penigkatan Kinerja Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kulon Progo. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus*.
- Ramadhani, O., Hasanuddin, T., dan Listiana, I. 2020. Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Suluh Pembangunan*, 02 (02).76-83.
- Ratnadila, N. S. 2018. Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(2), 111-128.
- Riant, N., F, A, Suprpto., dan Sapto. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ridwan, Z. 2013. Payung hukum pembentukan BUMDes. *Viat Justika Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3).
- Siti, I, A, D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam pendidikan*. UNY. Yogyakarta.
- Slamet, M. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sundari, D., dan R. Virianita. 2020. Partisipasi Masyarakat Dan Keberhasilan Pengembangan “Kampoeng Wisata Cinangneng” Desa Cihideung Udik,

Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 4 (4):695-712

Syarief, Y. A., Effendi, I., Nikmatullah, D., & Agista, S. 2023. Hubungan Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pendamping dalam Mengembangkan Kinerja BUMDes di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 10(2), 1264-1275.

Tibala, R. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5 (1): 445-456.

Undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Winardi, J. 2004. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Raja Grafindo perkasa: Jakarta

Yanfika, H., Nurmayasari, I., Rangga, K, K., dan Silviana, F. 2023. Dukungan Lembaga dan Tingkat Partisipasi Petani dalam Keberlanjutan Usahatani Padi Sehat di Desa Rejo Asri. *Jurnal Penyuluhan* 19 (01), 22-33.